

DARI KEBIJAKAN KE KETAHANAN PANGAN: EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BOROGOJOL

Asep Saepul Malik^{1)*}
Universitas Al Ghifari¹⁾
Email: salasep303@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 19 Juli 2025
Disetujui: 18 Agustus 2025
Diterbitkan: 1 September 2025

Abstract

Food security is a fundamental need directly linked to the quality of life. However, the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Borogojol Village remains partly ineffective, as reflected in delayed distribution, limited community understanding, and inconsistent food quality. This study aims to evaluate the effectiveness of BPNT in enhancing household food security among beneficiaries. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through field observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's interactive model. Findings reveal that although program communication is relatively effective and implementers demonstrate strong dedication, weak institutional coordination and fluctuating food quality remain critical obstacles. Drawing on Edward III and Grindle's policy implementation frameworks, the study highlights the decisive role of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures in policy outcomes. Overall, this research underscores the need for capacity building, stronger coordination, and quality control to optimize BPNT's contribution to food security.

Keywords: Food Security, BPNT, Policy Implementation

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Borogojol belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan keterlambatan distribusi, pemahaman masyarakat yang terbatas, dan kualitas bahan pangan yang fluktuatif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas BPNT dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa meskipun komunikasi program berjalan cukup baik dan pelaksana menunjukkan dedikasi positif, koordinasi antar lembaga serta kualitas distribusi pangan masih menjadi kendala utama. Kajian teori Edward III dan Grindle menegaskan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM, koordinasi, serta pengawasan mutu untuk meningkatkan efektivitas BPNT.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, BPNT, Implementasi Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara (Undang-Undang Republik Indonesia, 2012). Tidak hanya sebatas aspek biologis, pemenuhan pangan juga dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang patut dijamin oleh negara, dan menariknya kerentanan pangan di Indonesia belakangan ini semakin dipengaruhi oleh faktor eksposur, sensitivitas, serta kapasitas adaptif di tingkat wilayah (Juliannisa, Rahma, Mulatsih, & Fauzi, 2025). Menariknya, kecukupan pangan sering kali dijadikan indikator utama pembangunan berkelanjutan karena berkaitan erat dengan kesehatan, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2022). Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan seluruh warganya memiliki akses yang layak terhadap pangan, baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan (Kalalo, 2024). Patut dicatat pula, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan muncul dampak serius berupa penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kerentanan sosial (Subarsono, 2016).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020–2022

Tahun	Bulan	Presentase %
2020	Maret	9,78%
	September	10,19%
2021	Maret	10,14%
	September	9,71%
2022	Maret	9,54%
	September	9,57%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020–2022. Pada Maret 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,78 persen dan meningkat menjadi 10,19 persen pada September 2020, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Menariknya, pada tahun-tahun berikutnya terlihat tren penurunan, meskipun tidak signifikan, yaitu 10,14 persen pada Maret 2021 turun menjadi 9,71 persen pada September 2021. Pada tahun 2022, angka kemiskinan relatif stabil di kisaran 9,54–9,57 persen, menunjukkan adanya perbaikan meski masih menyisakan tantangan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya penanggulangan, tingkat kemiskinan tetap menjadi persoalan yang perlu ditangani dengan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan, salah satunya yang paling krusial adalah kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi tersebut secara langsung membatasi akses kelompok miskin terhadap pangan bergizi, sehingga mereka rentan menghadapi ketahanan pangan yang lemah. Data BPS terbaru, misalnya, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 masih berada pada angka 8,47 persen, yang menegaskan kebutuhan intervensi kebijakan yang lebih konsisten (Badan Pusat Statistik, 2025). Sebagai respons, pemerintah merancang berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2017). Program ini juga menegaskan peran negara dalam menjadikan akses pangan sebagai strategi inti pengentasan kemiskinan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Kendati demikian, implementasi BPNT di Desa Borogojol belum sepenuhnya berjalan efektif. Sebagian keluarga penerima manfaat masih kurang memahami prosedur penyaluran bantuan maupun mekanisme penggunaannya. Selain itu, kualitas bahan pangan yang diterima kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Koordinasi antar lembaga pelaksana di tingkat desa pun belum optimal, sehingga kerap memunculkan keterlambatan distribusi. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa meskipun program sudah berjalan cukup lama, tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa masih jauh dari harapan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah berupaya mengulas implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari beragam perspektif. Abbas, Haning, Hasniati, Rusdi, dan Ibrahim (2025), misalnya, menemukan bahwa evaluasi BPNT dan PKH di Sulawesi Barat menunjukkan adanya kendala teknis dan perbedaan efektivitas dalam dimensi kebijakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mawarda, Isbandono, Febiyanti, Asmara, Safitri, Septiani, Kartika Sari, dan rekan (2025) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi BPNT di Jombang sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga serta pemahaman pelaksana program. Menariknya, penelitian terbaru juga menyoroti kerentanan pangan di Indonesia dari perspektif regional, dengan menekankan peran eksposur, sensitivitas, serta kapasitas adaptif dalam membentuk kerentanan ketahanan pangan (Juliannisa, Rahma, Mulatsih, & Fauzi, 2025). Dari temuan-temuan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun BPNT membawa manfaat, efektivitas implementasinya masih sangat bergantung pada faktor teknis, sosial, dan kelembagaan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, terdapat sejumlah titik persamaan sekaligus perbedaan yang patut dicatat. Sama halnya dengan penelitian terdahulu, studi ini juga menekankan keterkaitan antara implementasi BPNT dengan peningkatan kesejahteraan serta ketahanan pangan rumah tangga miskin. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus berfokus pada Desa Borogojol, Majalengka, sebuah lokus yang hingga kini belum banyak disentuh oleh kajian ilmiah. Selain itu, penelitian ini tidak sekadar membahas mekanisme implementasi, tetapi juga memperdalam analisis pada masalah koordinasi antar lembaga, tingkat pemahaman penerima manfaat, serta kualitas bahan pangan yang didistribusikan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap persoalan efektivitas program.

Perbedaan fokus tersebut menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Belum banyak kajian yang secara eksplisit menyoroti implementasi BPNT di Desa Borogojol dengan menempatkan pemahaman masyarakat dan kualitas pangan sebagai variabel utama yang memengaruhi ketahanan pangan. Originalitas penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan analisis implementasi kebijakan dengan evaluasi kondisi riil penerima manfaat di tingkat desa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur kebijakan publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas program bantuan sosial di Indonesia.

Urgensi penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan BPNT benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Patut dicermati bahwa sebuah kebijakan nasional yang dirancang baik berisiko gagal ketika implementasinya di tingkat lokal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan BPNT di Desa Borogojol, penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor penghambat yang berpotensi mereduksi tujuan kebijakan. Hal ini penting tidak hanya untuk Desa Borogojol, tetapi juga sebagai pelajaran yang relevan bagi daerah lain dengan kondisi sosial ekonomi yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mendukung perbaikan mekanisme perlindungan sosial berbasis pangan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Borogojol dengan fokus utama pada efektivitasnya dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Edward III

Implementasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menentukan apakah suatu kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Agustino, 2014). Komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan konsisten kepada pelaksana kebijakan. Sumber daya meliputi aspek manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan. Sementara disposisi dan struktur birokrasi berperan dalam memastikan pelaksana memiliki sikap yang mendukung dan organisasi mampu bekerja sesuai prosedur yang baku, indikator:

- Komunikasi: transmisi, kejelasan, konsistensi.
- Sumber daya: SDM, anggaran, sarana prasarana, kewenangan.
- Disposisi: sikap dan komitmen pelaksana.
- Struktur birokrasi: SOP dan fragmentasi tugas.

Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Grindle memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang ditentukan oleh dua hal utama: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang diinginkan, serta kejelasan aturan. Konteks implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan kelompok sasaran (Grindle, 1980 dalam Tachjan, 2006). Dengan demikian, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut realistis dan sesuai dengan kondisi sosial. Teori ini memberikan kerangka untuk menilai mengapa sebuah kebijakan kadang berhasil di satu tempat, tetapi gagal di tempat lain. Indikator:

- Isi kebijakan: kepentingan yang dipengaruhi, manfaat, kejelasan aturan, alokasi sumber daya.
- Konteks implementasi: kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik lembaga, tingkat kepatuhan kelompok sasaran.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012). Ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan, tetapi juga akses dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Menariknya, ketahanan pangan dipandang bukan sekadar masalah konsumsi, melainkan juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik yang responsif terhadap masalah kemiskinan. Indikator:

- Ketersediaan pangan.
- Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan.
- Kualitas dan keamanan pangan.
- Pemanfaatan pangan untuk gizi dan kesehatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pilihan metode ini bukan tanpa alasan, sebab pendekatan tersebut dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam dinamika implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Borogojol yang sarat dengan aspek sosial, kelembagaan, dan interaksi antaraktor. Sebagaimana ditegaskan Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna, konteks, serta proses yang berlangsung dalam sebuah fenomena sosial. Patut dicatat, relevansi metode ini terletak pada kemampuannya menjelaskan permasalahan implementasi BPNT yang tidak cukup diterangkan melalui angka semata, melainkan perlu diperkaya dengan narasi, interpretasi, serta pengalaman konkret dari penerima manfaat maupun pelaksana program. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara utama. Pertama, observasi lapangan untuk melihat langsung mekanisme implementasi BPNT. Kedua, wawancara mendalam dengan perangkat desa, pendamping program, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Ketiga, dokumentasi berupa data sekunder seperti laporan desa, peraturan, dan pedoman teknis yang terkait. Menariknya, ketiga teknik ini tidak berdiri sendiri, melainkan diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Dengan cara ini, sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman (2014), hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan karena data diperoleh dari berbagai sumber sekaligus diuji konsistensinya.

Untuk teknik sampling, penelitian ini memadukan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling digunakan dengan menyeleksi informan kunci berdasarkan kriteria tertentu, misalnya perangkat desa atau petugas puskesmas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BPNT. Sementara itu, snowball sampling dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan data melalui rekomendasi dari informan awal, sehingga pengalaman KPM yang beragam dapat terhimpun. Nazir (2013) menekankan bahwa teknik ini relevan untuk penelitian kualitatif, sebab memungkinkan peneliti menjangkau sumber informasi yang tepat sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, kombinasi kedua teknik ini membuat proses pengumpulan data lebih kaya dan representatif.

Adapun analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang berlangsung melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyaring dan menyederhanakan informasi agar fokus pada data yang paling relevan. Tahap kedua berupa penyajian data dalam bentuk uraian naratif, matriks, maupun tabel untuk memudahkan interpretasi. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data yang telah dianalisis untuk menemukan pola, makna, serta implikasi dari implementasi BPNT terhadap ketahanan pangan masyarakat. Menariknya, model analisis ini tidak bersifat linear, melainkan interaktif, sehingga setiap tahap dapat saling memengaruhi dan memperkuat pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi BPNT

Tabel 2. Pembahasan Komunikasi dalam Implementasi BPNT di Desa Borogojol

Indikator Komunikasi	Temuan Penelitian di Desa Borogojol	Temuan Penelitian di Desa Borogojol
Transmisi	Informasi disalurkan melalui media sosial, brosur, dan	Informasi disalurkan melalui media sosial, brosur, dan

	pelatihan bagi petugas. Namun efektivitas masih bergantung pada kemampuan masyarakat mengakses dan memahami informasi.	pelatihan bagi petugas. Namun efektivitas masih bergantung pada kemampuan masyarakat mengakses dan memahami informasi.
Kejelasan	Informasi terkait jadwal dan prosedur relatif jelas melalui Puskesmas, tetapi penyampaian belum merata sehingga sebagian masyarakat masih kurang informasi.	Informasi terkait jadwal dan prosedur relatif jelas melalui Puskesmas, tetapi penyampaian belum merata sehingga sebagian masyarakat masih kurang informasi.
Konsistensi	Jadwal penyaluran, prosedur registrasi, dan tahapan distribusi relatif stabil, tetapi kualitas pangan yang diterima masih fluktuatif.	Jadwal penyaluran, prosedur registrasi, dan tahapan distribusi relatif stabil, tetapi kualitas pangan yang diterima masih fluktuatif.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Transmisi Komunikasi

Penelitian ini menemukan bahwa transmisi komunikasi dalam implementasi BPNT di Desa Borogojol berlangsung melalui beragam saluran, mulai dari media sosial, brosur, hingga pelatihan petugas lapangan. Strategi ini memang dirancang untuk mempercepat penyaluran informasi kepada penerima manfaat. Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa keberagaman media tidak otomatis menjamin efektivitas, sebab masih sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mengakses dan memahami pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, banyaknya saluran komunikasi belum tentu efektif bila tidak sesuai dengan karakter sosial penerima. Hal ini sejalan dengan temuan Ailiyah, Chalimah, Nur Fauzi, dan Wahyudi (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun BPNT disalurkan tepat sasaran dan waktu, efektivitas program tetap bergantung pada kesiapan mekanisme distribusi serta daya serap informasi masyarakat.

Kejelasan Informasi

Dari aspek kejelasan, wawancara dengan perangkat desa maupun penerima manfaat menunjukkan bahwa informasi terkait jadwal penyaluran, mekanisme pencairan, dan prosedur program umumnya disampaikan dengan jelas. Puskesmas memainkan peran sentral dalam menyebarkan informasi ke setiap dusun sehingga sebagian besar KPM mengetahui hak dan kewajiban mereka. Namun, patut dicatat bahwa kejelasan ini masih bersifat formal; masyarakat yang tidak aktif mengikuti sosialisasi sering kali tertinggal informasi. Fenomena ini menimbulkan kritik bahwa distribusi informasi belum sepenuhnya merata, karena masih ada kelompok sasaran yang menghadapi hambatan komunikasi. Kondisi ini senada dengan hasil penelitian Nurjanah (2024) yang menekankan bahwa kejelasan informasi dan peran aktif aparat desa menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi BPNT di tingkat lokal.

Konsistensi Pelaksanaan

Dalam hal konsistensi, hasil lapangan menunjukkan bahwa jadwal penyaluran, prosedur registrasi, dan tahapan distribusi relatif stabil dari waktu ke waktu. Aparat desa menegaskan bahwa waktu pencairan dan distribusi melalui e-warung jarang berubah, sehingga memberi kepastian bagi penerima manfaat. Konsistensi ini tentu patut diapresiasi karena mampu membangun kepercayaan masyarakat. Namun, terdapat catatan kritis: konsistensi administratif belum diiringi dengan konsistensi kualitas bahan pangan yang diterima. Dengan demikian, stabilitas prosedur tidak selalu paralel dengan kualitas hasil program. Kondisi ini sejalan dengan temuan Syaparudin (2021) yang menegaskan bahwa stabilitas administratif tidak akan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat miskin tanpa jaminan mutu dari bahan yang disalurkan.

Sumber Daya Anggaran

Pelaksanaan BPNT di Borogojol sepenuhnya bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat, yaitu Rp200.000 per KPM per bulan. Secara nominal, bantuan ini cukup untuk menutupi kebutuhan dasar tertentu, tetapi efektivitasnya menurun ketika dihadapkan pada kenaikan harga bahan pokok dan keragaman pola konsumsi rumah tangga. Ketergantungan tunggal pada anggaran pusat juga membuat desa kurang leluasa merespons kendala teknis di lapangan. Dengan demikian, meskipun dana disalurkan secara rutin, daya ungkitnya terhadap ketahanan pangan masih terbatas. Hasil ini memperkuat pendapat Subarsono (2016) yang menekankan bahwa kebijakan anggaran yang tidak menyesuaikan dinamika lokal sering kali melemahkan efektivitas program publik.

Institusi Pelaksana

Secara kelembagaan, implementasi BPNT di Borogojol melibatkan banyak aktor, mulai dari perangkat desa, puskesmas, dinas sosial, hingga bank penyalur. Idealnya, kerjasama multipihak ini meningkatkan efektivitas program, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih peran, khususnya antara perangkat desa dan pendamping program. Akibatnya, koordinasi yang lemah kerap memperlambat alur distribusi. Menariknya, temuan ini kontras dengan penelitian Islami (2025) yang menemukan bahwa koordinasi antar lembaga justru dapat memperkuat efektivitas program di daerah lain. Artinya, efektivitas kelembagaan BPNT sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi di tingkat lokal.

Infrastruktur Teknis

Dalam aspek infrastruktur teknis, Borogojol sudah memiliki fasilitas penunjang seperti e-warung dan jaringan perbankan mitra. Secara umum, sarana ini memadai, tetapi distribusinya belum merata sehingga menyulitkan KPM di dusun terpencil. Kesenjangan akses ini menambah biaya transportasi dan waktu, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bantuan. Situasi ini sejalan dengan temuan Albar, Taufikurrohman, dan Hidayat (2024) di Cirebon yang menunjukkan bahwa keterbatasan sarana teknis dapat menghambat efektivitas distribusi BPNT.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi BPNT. Di Borogojol, Puskesmas telah membentuk tim penyalur dan pendamping, namun jumlah dan kapasitas mereka masih terbatas. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan menyebabkan kesalahan teknis masih ditemukan dalam sosialisasi maupun distribusi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan SDM tidak cukup tanpa peningkatan kompetensi dan sistem insentif yang memadai. Temuan ini menguatkan pandangan Edward III dalam Agustino (2014) bahwa kualitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan dan kemampuan SDM pelaksana.

Dedikasi dan Pemahaman Tugas

Pelaksana program di Borogojol memperlihatkan dedikasi yang cukup baik dengan pemahaman jelas atas tugas dan fungsi mereka. Mereka konsisten hadir dalam setiap tahap distribusi dan berusaha menjaga kelancaran pelaksanaan. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian Albar, Taufikurrohman, dan Hidayat (2024) di Cirebon, terdapat perbedaan: di sana sebagian pelaksana justru mengalami keterbatasan pemahaman teknis sehingga menghambat distribusi. Perbedaan ini menegaskan bahwa disposisi pelaksana sangat kontekstual, dipengaruhi kapasitas lokal dan kualitas koordinasi. Maka, penting adanya pelatihan berkelanjutan agar dedikasi pelaksana tidak berhenti pada kehadiran, tetapi juga tercermin dalam penguasaan teknis yang memadai.

Sikap Pelayanan terhadap Penerima Manfaat

Sikap pelayanan aparat desa dan tim puskesmas di Borogojol relatif ramah dan responsif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, hal ini tidak sepenuhnya selaras dengan temuan Mufatiroh, Hidayat, dan Nurhayati (2021), yang mencatat bahwa di beberapa daerah sikap pelaksana masih cenderung formalistik dan kurang melibatkan penerima manfaat. Bahkan, Syaparudin (2021) mengingatkan adanya potensi ketidakadilan pelayanan jika nilai-nilai etika dan sosial tidak dijadikan landasan dalam implementasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa sikap pelayanan sangat dipengaruhi konteks sosial: bisa menjadi kekuatan jika dijalankan secara humanis, tetapi juga dapat menjadi kelemahan bila tidak diiringi dengan konsistensi dan pengawasan mutu.

Mekanisme dan SOP

Di Borogojol, pelaksanaan BPNT berpedoman pada SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Dari segi administratif, prosedur ini cukup menjaga konsistensi alur pelaksanaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pada SOP lebih bersifat formal, sehingga tidak selalu menyelesaikan persoalan teknis seperti keterlambatan distribusi atau kualitas bahan pangan. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Mufatiroh, Hidayat, dan Nurhayati (2021) yang mencatat bahwa penerapan SOP di Jawa Timur justru meningkatkan kejelasan prosedur dan mengurangi kesalahan distribusi. Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa efektivitas SOP sangat dipengaruhi oleh adaptasi terhadap konteks lokal, bukan semata-mata oleh dokumen aturan itu sendiri.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur birokrasi di Borogojol menempatkan desa sebagai fasilitator dan puskesmas sebagai pelaksana teknis. Secara teoritis, pembagian ini dapat menciptakan spesialisasi fungsi, tetapi dalam praktik masih ada tumpang tindih tugas dan lemahnya koordinasi antar aktor. Akibatnya, efektivitas program belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini berbeda dengan penelitian Albar, Taufikurrohman, dan Hidayat (2024) yang mencatat bahwa di Cirebon, struktur organisasi yang jelas justru mempercepat distribusi dan mengurangi kebingungan penerima manfaat. Selain itu, Grindle (1980 dalam Tachjan, 2006) menegaskan bahwa kejelasan peran antar aktor merupakan faktor penting keberhasilan implementasi. Dengan demikian, kelemahan di Borogojol bukan terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada lemahnya mekanisme koordinasi dan kontrol yang seharusnya menopang struktur organisasi.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Borogojol telah berjalan dengan dukungan komunikasi yang cukup baik, sumber daya yang tersedia, disposisi pelaksana yang relatif positif, serta struktur birokrasi yang formal; namun efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan koordinasi antar lembaga, pemahaman masyarakat yang tidak merata, dan fluktuasi kualitas bahan pangan yang diterima. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun tujuan penelitian untuk

mengevaluasi efektivitas BPNT dalam meningkatkan ketahanan pangan telah tercapai, hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian analisis kontekstual di tingkat desa yang jarang diulas dalam penelitian sebelumnya, sehingga memperkaya literatur kebijakan publik tentang implementasi program sosial.

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, perbaikan sistem koordinasi antar lembaga, serta pengawasan mutu bahan pangan agar manfaat program lebih optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan komparatif antar wilayah atau metode kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi implementasi BPNT. Patut dicatat pula bahwa keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu desa, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya. Dari sisi kebijakan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika lokal agar kebijakan perlindungan sosial, khususnya BPNT, dapat benar-benar menjawab persoalan ketahanan pangan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abbas, R., Haning, M. T., Hasniati, H., Rusdi, M., & Ibrahim, M. A. (2025). Evaluation of PKH and BPNT social assistance programs using William Dunn's five dimensions: A case study in West Sulawesi, Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Administrative Science (ICAS 2024)*. Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-791-5_41](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-791-5_41)
- Ailiyah, N., Chalimah, N., Nur Fauzi, M. A., & Wahyudi, M. A. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Desa Seboro, Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 131–141. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3359>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. BPS Press Release. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. [https://books.google.com/books/about/Politics_and_Policy_Implementation_in_th.html?id=1aGCQgAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Politics_and_Policy_Implementation_in_th.html?id=1aGCQgAACAAJ)
- Himawan Shaputra Munandar, R., & Rostyaningsih, D. (2024). Analisis penerapan etika pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1 (1), 351–363. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.48801>
- Juliannisa, I. A., Rahma, H., Mulatsih, S., & Fauzi, A. (2025). Regional vulnerability to food insecurity: The case of Indonesia. *Sustainability*, 17 (11), 4800. <https://doi.org/10.3390/su17114800>
- Jurnal FISIP UNTAD. (2025). Penerapan etika pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik: tantangan dan hambatan. *Journal of Publicness Studies (JPS)*, 2 (5). Retrieved from

- <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/article/download/1959/603>
- Kalalo, E. (2024). The influence of public administration science paradigm shift in its realization good governance. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7 (4), 2545–2560.
<https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2545>
- Mawarda, Y. O., Isbandono, P., Febiyanti, A. N., Asmara, M. P., Safitri, Y. D., Septiani, D. W., Kartika Sari, Y. E., & others. (2025). Implementation of “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” program policy in Ngusikan Village, Jombang Regency. In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2024)*. Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_185](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_185)
- Pusat Kajian AKN. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan SDM Verifikasi DTKS. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/buku-pka-public-16.pdf>
- Subarsono, A. G. (2016). Analisis kebijakan publik (Konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, H., & Rahman, F. (2023). Implementation of stunting prevention policies using Edward III theory in Papua. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2 (6), 8105–8115.
<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/download/8105/7975/29075>
- Syahrul, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, D. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian & Sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 64–76.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
<https://bphn.go.id/data/documents/12uu018.pdf>